

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif

Sumber: RPJMD Kabupaten Semarang 2021-2026

69

Kabupaten Grobogan di sebelah timur, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung di sebelah barat, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang di sebelah selatan, serta Kota Salatiga di tengah Kabupaten Semarang. Kondisi ini menempatkan wilayah Kabupaten Semarang memiliki letak yang strategis bagi perkembangan wilayah Yogyakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar) karena berada di jalur penghubung ketiganya. Saat ini, ibukota Kabupaten Semarang terletak di Kota Ungaran yang tidak berada di tengah wilayah sehingga dianggap terlalu jauh bagi beberapa kecamatan untuk kegiatan administrasi pemerintahan.

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan, Luas Wilayah, dan Jarak Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Semarang (2024)

No.	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa atau Kelurahan	Luas (km ²)	Jarak (km)
1.	Getasan	Getasan	13	68,03	37
2.	Tengaran	Tengaran	15	49,95	38
3.	Susukan	Susukan	13	50,31	46
4.	Kaliwungu	Kaliwungu	11	31,08	49
5.	Suruh	Suruh	17	66,21	33
6.	Pabelan	Pabelan	17	51,86	30
7.	Tuntang	Tuntang	16	61,18	17
8.	Banyubiru	Banyubiru	10	51,85	22
9.	Jambu	Jambu	10	52,06	23
10.	Sumowono	Sumowono	16	58,86	22
11.	Ambarawa	Kranggan	10	29,79	18
12.	Bandungan	Bandungan	10	47,41	16
13.	Bawen	Harjosari	9	46,69	12
14.	Bringin	Bringin	16	68,19	25
15.	Bancak	Boto	9	45,51	36
16.	Pringapus	Pringapus	9	84,27	12
17.	Bergas	Bergas Lor	13	45,81	7
18.	Ungaran Barat	Lerep	11	48,79	3
19.	Ungaran Timur	Kalongan	10	61,12	5

Sumber: Kabupaten Semarang dalam Angka (2025)

2.1.2 Luas Penggunaan Lahan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 memiliki visi Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera, dan Mandiri (BERDIKARI) yang salah satunya diwujudkan melalui misi peningkatan kemandirian perekonomian daerah berbasis potensi unggulan, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata (INTANPARI). Kondisi ini menyebabkan setengah dari lahan seluas 95.020,67 ha dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Di tahun 2024, BPS Kabupaten Semarang (2025) mencatat bahwa pemanfaatan lahan pertanian dibagi menjadi dua jenis, yaitu lahan pertanian sawah seluas 19.520,31 ha (35,68%), dan lahan pertanian bukan sawah 54.713,94 ha (64,32%). Berikut adalah data perbandingan penggunaan lahan.

Tabel 2.2 Penggunaan Lahan Pertanian Tahun 2022-2024

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)		
		2022	2023	2024
Lahan Pertanian		68,093.68	68,290.44	74,234.25
1.	Sawah	23.723,79	23.694,02	19.520,31
2.	Bukan Sawah	44.369,89	44.596,42	54.713,94

Sumber: Profil Lingkungan Hidup Kab Semarang 2024 (BPS, 2025)

Tabel 2.2 di atas menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada penggunaan lahan yang didominasi oleh sektor pertanian. Lahan pertanian sawah biasa digunakan dalam budidaya tanaman pangan sedangkan lahan pertanian bukan sawah merupakan lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Kondisi ini berkontribusi pada kemunculan komoditas pada hasil pertanian dan perkebunan yang menyumbang 10,39% ekonomi daerah

(BPS, 2025). Di tahun 2024, produksi tanaman pangan yang menjadi primadona Kabupaten Semarang adalah padi sawah (154.681 ton), jagung (61.652,10 ton), dan ubi kayu (23.879,39 ton). Adapun pada sektor perkebunan, komoditas tanaman yang banyak dikembangkan adalah kelapa dalam (3.446,12 ton), kelapa deres (1.920,42 ton), dan kopi robusta (2.025,50 ton).

2.1.3 Kondisi Demografis

Berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Semarang di tahun 2025 mencapai 1.098.572 jiwa atau meningkat 0,81% dari tahun 2024 sebanyak 1.089.767 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk di daerah ini sebesar 1.069,16 orang/km² dengan kepadatan terbesar berada di Kecamatan Ambarawa, Bergas, dan Ungaran Barat. Kondisi tersebut menyebabkan adanya peningkatan terhadap partisipasi angkatan kerja yang menunjukkan tren positif, yaitu 79,29% yang lebih baik 3,22% dari tahun sebelumnya. Adapun menurut lapangan usaha, penduduk yang bekerja didominasi oleh sektor jasa, industri, dan pertanian yang dijelaskan dalam tabel.

Tabel 2.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Penduduk Belum/Tidak Bekerja	70.644	132.170	202.814
2.	Penduduk Bekerja	353.158	301.254	654.412
	Pertanian	87.152	47.335	134.487
	Industri	123.385	123.283	246.668
	Jasa	142.621	130.636	273.257

Sumber: Kabupaten Semarang dalam Angka 2024 (2025)

Tabel 2.3 mencatat jumlah penduduk yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang tidak bekerja. Sektor jasa menjadi usaha yang banyak memberikan lapangan pekerjaan disusul sektor industri dan terakhir pertanian. Pada sektor pertanian dengan total 134.487 orang pekerja, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Semarang serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah membentuk dan mengesahkan kelembagaan usaha tani sebagai proses belajar, kerja sama, dan berkembang bersama untuk mewujudkan pengelolaan usaha pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan. Tabel 2.4 berikut akan menyampaikan data tentang jumlah kelompok tani yang sudah terbentuk dan menjalankan usaha pertanian di wilayah Kabupaten Semarang.

Tabel 2.4 Jumlah Kelompok Tani dan Kelompok Tani Hutan di Kabupaten Semarang 2024

No.	Kelembagaan Usaha Tani	Kelas Kelompok Tani				Jumlah
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
1.	Kelompok Tani	968	1.072	115	6	2.161
2.	Kelompok Tani Hutan	193	-	5	1	199

Sumber: Satu Data Kab. Semarang (2025) dan Programa Kehutanan Jawa Tengah (2025)

Tabel 2.4 di atas menunjukkan bahwa mayoritas kelembagaan usaha tani berasal dari sektor pertanian dengan jumlah 2.161 KT disusul oleh sektor kehutanan sebanyak 199 KTH dengan mayoritas kelas kelembagaan usaha berada di kelas Pemula. Kelas pemula merupakan kelas paling awal yang diberikan kepada sebuah kelompok tani setelah mengalami pembentukan kelembagaan. Kondisi KTH dengan jumlah kelas pemula sebanyak 193 di Kabupaten Semarang menjadi bukti

bahwa diperlukan adanya pendampingan oleh Dinas Kehutanan untuk mewujudkan pengelolaan kehutanan yang lebih berkelanjutan.

2.2 Kelompok Tani Hutan Mandiri Jaya

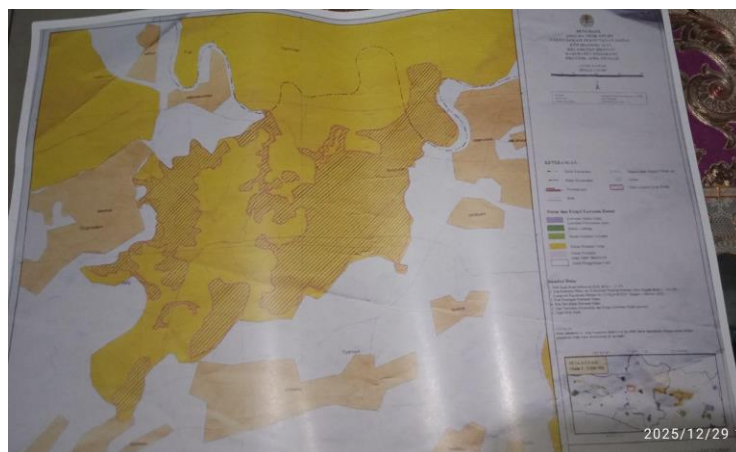
2.2.1 Sejarah Pembentukan KTH

KTH Mandiri Jaya adalah satu satunya kelompok tani hutan di Kecamatan Bringin yang menerima perizinan perhutanan sosial. Kelompok ini dibuat pada tahun 2019 dengan bantuan fasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Salatiga sebagai pendamping dan menerima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di tahun 2021 melalui skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Berdasarkan Nomor: SK.2663/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2021, KTH Mandiri Jaya mendapatkan izin untuk mengelola kawasan hutan negara secara legal seluas 118 hektar di lahan hutan produksi tetap Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang, Perum Perhutani. Dalam mengelola kawasan hutan, KTH Mandiri Jaya memiliki kewajiban sebagai berikut.

1. Menyusun Rencana Pemanfaatan Hutan (RPH) selama 10 tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) selama 1 tahun sesuai perundangan.
2. Memberi penandaan batas areal kerjanya.
3. Menanam pohon berkayu di atas 50% dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya.
4. Menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.
5. Melaksanakan perlindungan dan keamanan hutan.
6. Mempertahankan fungsi hutan.

7. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kelompok Tani Hutan dapat melakukan penataan kelembagaan sesuai kemampuan kelompok tani.

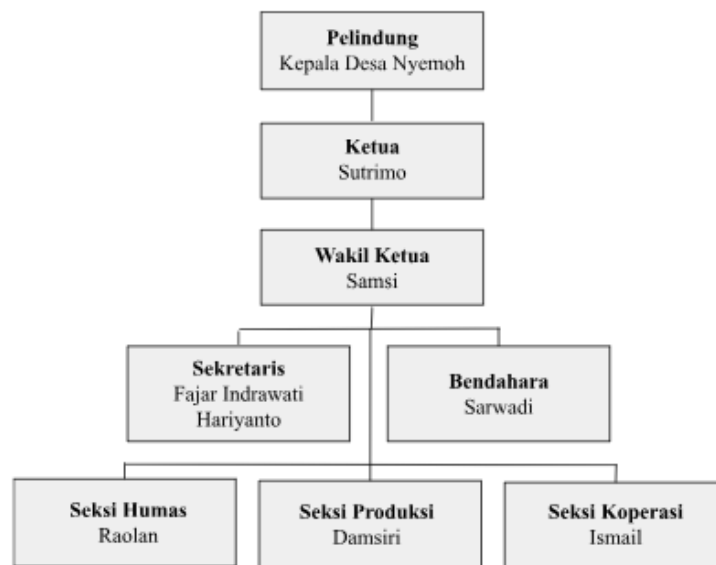
Saat ini, KTH Mandiri Jaya terdiri atas 145 petani yang terdaftar dalam kelompok usaha perhutanan sosial KUPS Mandiri Jaya I, Mandiri Jaya II, dan Mandiri Jaya III berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nyemoh Nomor 500.4/32/2025. Adanya perbedaan terhadap jumlah keanggotaan pada SK Perhutanan Sosial dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan negara dilakukan oleh petani yang aktif menggarap lahan. Hal ini disebabkan karena kawasan hutan yang termasuk areal IPHPS termasuk dalam wilayah Desa Nyemoh, Desa Tempuran, dan Desa Wiru sebagaimana tampak pada Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Peta Kerja Areal IPHPS KTH Mandiri Jaya

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi kewajiban kelompok PS pada ayat (9), KTH Mandiri Jaya telah memiliki struktur organisasi yang disahkan oleh Kepala Desa Nyemoh selaku pembina. Berikut dilampirkan gambar struktur organisasi KTH Mandiri Jaya.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi KTH Mandiri Jaya

Sumber: SK Kepala Desa Nyemoh No.412.2/04/IV/2019

2.2.2 Rencana Kerja Perhutanan Sosial

KTH Mandiri Jaya telah menyusun Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) untuk periode 2021-2030. Lokasi IPHPS secara administratif berada di Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini berbatasan dengan hutan produksi di sebelah utara, APL Desa Boto di sebelah selatan, APL Desa Bantal di sebelah barat, dan APL Desa Wiru di sebelah timur. Kawasan hutan negara yang saat ini dikelola sebelumnya menjadi wilayah kerja BKPH Tempuran, KPH Semarang, Perum Perhutani. Meskipun namanya

adalah hutan tetapi kondisi tutupan saat perizinan diajukan masih berupa lahan terbuka dengan hutan tanaman sebesar 5,9% milik Perhutani.

Tabel 2.5 Keadaan Fisik Wilayah Desa Nyemoh

No.	Tutupan Lahan	Luas (ha)	Topografi	Pohon Dominan
1.	Lahan Terbuka	111	Datar, Berbukit	Jati
2.	Hutan Tanaman	6,9		

Sumber: RKPS KTH Mandiri Jaya 2021-2030 (2021)

Pada bagian demografi kependudukan, Desa Nyemoh memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.003 orang dengan 996 penduduk laki-laki dan 1.007 perempuan. Mayoritas penduduk merupakan angkatan kerja yang memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian (60%), industri pengolahan (1%), jasa konstruksi dan bangunan (30%), perdagangan (2%), perhubungan dan angkutan (1%), serta jasa lainnya (5%). Tingginya masyarakat yang berprofesi sebagai petani menjadikan perizinan perhutanan sosial program yang tepat untuk memanfaatkan hutan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Tabel 2.6 Data Potensi Wilayah Desa Nyemoh

No.	Potensi	Jenis Potensi	Keterangan
1.	Hasil Hutan Kayu	Jati, Sengon, Balsa	Sesuai Keadaan
2.	Hasil Hutan Bukan Kayu	Jamur, Lebah, Bambu, Pisang, Alpukat, Mangga	Potensi Akan Dikembangkan
3.	Jasa Lingkungan	Bumi Perkemahan, Motor Cross, Kebun Buah	Wisata Alam

Sumber: RKPS KTH Mandiri Jaya 2021-2030 (2021)

Dalam melaksanakan kegiatan usaha selama 35 tahun sesuai jangka waktu yang diberikan pada skema IPHPS, KTH Mandiri Jaya telah memiliki Kelompok

Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang terdiri atas KUPS Mandiri Jaya I, KUPS Mandiri Jaya II, dan KUPS Mandiri Jaya III. Menurut hasil wawancara dengan Pak Sarwadi selaku Bendahara KTH Mandiri Jaya, pembentukan KUPS dilakukan berdasarkan wilayah tempat tinggal petani mengingat lahan IPHPS dimanfaatkan oleh desa lainnya Berikut adalah sebaran potensi usaha oleh setiap KUPS.

Tabel 2.7 Rencana Pengelolaan Usaha PS KTH Mandiri Jaya

No.	Nama KUPS	Potensi Usaha	Ketua
1.	KUPS Mandiri Jaya I	Palawija	Raolan
2.	KUPS Mandiri Jaya II	Pembibitan	Hariyanto
3.	KUPS Mandiri Jaya III	Buah-Buahan	Sukiman

Sumber: RKT KTH Mandiri Jaya 2021-2022 (2021)

2.3 Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa pembentukan cabang dinas dilakukan sebagai bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintah di bidang kehutanan dan memiliki unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. Di Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Kehutanan terbagi ke dalam 11 wilayah yang berbeda dengan wilayah kerja CDK Wilayah III mencakup Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kota Semarang, dan Kota Salatiga. Lokasi kantor berada di Gedung Training Centre Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Kompleks Tarubudaya, Kabupaten Semarang. CDK Wilayah III memiliki tugas

untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas sub urusan kehutanan wilayah kerjanya dengan fungsi:

1. Penyusunan rencana sub urusan penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi sumber daya alam.
2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi sumber daya alam.
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi sumber daya alam.
4. Pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan pemenuhan terhadap fungsinya, CDK Wilayah III memiliki struktur organisasi guna memudahkan pembagian tugas secara struktural. Berikut adalah struktur organisasi CDK Wilayah III.



Gambar 2.4 Struktur Organisasi CDK Wilayah III

Sumber: Pergub Jateng No. 43 Tahun 2018

2.3.2 Penyuluh Kehutanan

Penyuluh Kehutanan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan. Penyuluhan kehutanan sendiri adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraan, dan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Saat ini, jumlah KTH yang didampingi oleh CDK Wilayah III sejumlah 477 kelompok dengan 471 memiliki perizinan di luar kawasan hutan melalui Hutan Rakyat dan 6 kelompok di dalam kawasan hutan melalui perhutanan sosial skema IPHPS. Berdasarkan SK Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah III Nomor: 188.4/690/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penempatan

dan Penugasan Penyuluh Kehutanan, Penunjukan Koordinator Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah III, penyuluh kehutanan PNS yang aktif saat ini berjumlah 25 orang dengan pembagian tempat tugas sebagai berikut.

Tabel 2.8 Data Penyuluh Kehutanan PNS CDK Wil. III

No.	Nama	Jabatan	Tempat Tugas
1.	Chandra Puspita Sari, S.Hut, M.Ling.	Koordinator Penyuluh CDK III/Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	Kecamatan Mojosongo, Ampel
2.	FX. Suyadi, S.TP.	Wakil Koordinator Penyuluh CDK III/Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	Kecamatan Bawen, Bringin
3.	Hasto Subroto, S.TP.	Koordinator Penyuluh Boyolali/Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	Kecamatan Kemusu, Banyudono
4.	Erry Irawan, S.Hut.	Koordinator Penyuluh Semarang/Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	Kecamatan Tengaran, Suruh, Bancak
5.	Djoko Sunarto, S.TP.	Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	Kecamatan Tengaran, Bringin, Banyubiru, Pringapus, Ungaran Barat, Juwangi, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamudro, Klego, Banyudono
6.	Anik Setyawati, S.TP.	Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	Kecamatan Susukan, Bancak, Jambu, Tuntang, Bergas, Boyolali, Teras, Simo, Mojosongo,

			Sambi, Karanggede
7.	Turut, S.TP.	Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	Kota Salatiga, Kecamatan Getasan, Pabelan, Ambarawa, Ungaran Timur, Bandungan, Selo, Gladagsari, Ampel, Andong
8.	Satryani Kartika N. Ika, S.Hut.	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	Kecamatan Ungaran Timur, Ungaran Barat
9.	M. Djudi	Penyuluh Kehutanan Mahir	Kota Semarang, Ungaran Barat
10.	Antonius Waluyo, S.P.	Penyuluh Kehutanan Mahir	Kecamatan Jambu, Banyubiru
11.	Maemonah, S.TP.	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	Kecamatan Bandungan, Bergas
12.	Sri Fitriani, S.TP.	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	Kecamatan Sumowono, Ambarawa
13.	Titus Hendriyanto, S.ST.	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	Kecamatan Pabelan, Getasan, Kota Salatiga
14.	Widaryanto, S.ST.	Penyuluh Kehutanan Mahir	Kecamatan Tuntang, Pringapus
15.	Nur Rohatun, S.TP.	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	Kecamatan Kaliwungu, Susukan
16.	Totok Ariyanto, S.Hut, MM	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	Kecamatan Tamansari, Cepogo
17.	Dwi Eriyana, S.Hut.	Penyuluh Kehutanan Ahli	Kecamatan Musuk

		Muda	
18.	Iskandar, S.ST.	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	Kecamatan Selo
19.	Kukuh Subiyanto, S.P.	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	Kecamatan Sawit, Nogosari
20.	Suratno, S.TP.	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	Kecamatan Juwangi, Klego
21.	Cahyo Nugroho, S.TP.	Penyuluh Kehutanan Penyelia	Kecamatan Wonosamudro, Wonosegoro
22.	Khristiyawarti, S.P.	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	Kecamatan Andong, Ngemplak
23.	Denny Irawati, AMd	Penyuluh Kehutanan Mahir	Kecamatan Teras, Simo
24.	Joko Purnomo, S.P.	Penyuluh Kehutanan Mahir	Kecamatan Sambu, Karanggede
25.	Edi Astoto, S.P.	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	Kecamatan Gladagsari

Sumber: Programa Penyuluhan CDK III Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.8, terdapat dua penyuluh kehutanan yang bertugas di Kecamatan Bringin, yaitu Bapak FX. Suyadi, S.TP. dan Bapak Djoko Sunarto, S.TP. Namun, Bapak Suyadi atau akrab disapa sebagai Pak Yadi telah mengalami pensiun di tahun 2024 sehingga perannya digantikan oleh Pak Djoko. Saat ini, wilayah kerja beliau terbagi atas dua kota, yaitu Kabupaten Boyolali di Kecamatan Banyudono serta Kabupaten Semarang di Kecamatan Suruh dan Kecamatan Bringin dengan total 19 KTH binaan, salah satunya KTH Mandiri Jaya. Hal ini meyakinkan teori bahwa Penyuluh Kehutanan Kecamatan Bringin memiliki beban kerja yang tinggi dengan wilayah binaan yang mencakup dua kabupaten sekaligus.

2.3.3 Programa Penyuluhan

Programa Penyuluhan adalah dokumen tertulis tentang rencana kegiatan penyuluhan yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang akan dicapai, masalah yang dihadapi, dan cara mencapai tujuan. Programa Penyuluhan CDK Wilayah III disusun untuk memberikan dukungan dalam mencapai tujuan pembangunan kehutanan. Di tingkat provinsi, prioritas pembangunan kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 difokuskan pada upaya peningkatan kualitas tutupan lahan serta pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai ekonomi hasil hutan. Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup CDK adalah pertumbuhan PDRB sektor kehutanan, peningkatan luas tutupan lahan, dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat kehutanan dengan sasaran kegiatan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan:

- a. Adanya inovasi teknologi dan produksi dari pelaku usaha kehutanan.
- b. Pengelolaan hutan rakyat lestari mengacu ketentuan SVLK. Adanya peningkatan volume produksi dan penjualan produk pelaku usaha kehutanan.
- c. Pengembangan sektor usaha kehutanan memberikan dampak peningkatan kesejahteraan petani.
- d. Pengembangan ekowisata dengan mengedepankan aspek ekologis.

2. Peningkatan Luas Tutupan Lahan:

- a. Adanya penanaman di kanan kiri sungai dan daerah tangkapan air serta sekitar sumber mata air.
- b. Laju penebangan dapat ditekan.
- c. Laju erosi dapat diminimalkan.
- d. Petani mampu memenuhi kebutuhan bibit yang murah, mudah, dan berkualitas secara mandiri.
- e. Perubahan sistem bertanam monokultur menjadi multikultur (agroforestri, wanafarma dll).

3. Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Kehutanan:

- a. Kelembagaan kelompok lebih kuat dan mandiri.
- b. Partisipasi anggota dalam kelompok lebih meningkat.
- c. Petani dan anggota kelompok kehutanan lebih sejahtera.